

JURUS SAKTI REHABILITASI PRABOWO, BEBASKAN IRA ASDP DARI BUI

Langkah rehabilitasi yang diteken Presiden Prabowo menjadi titik balik dramatis nasib mantan Dirut ASDP, Ira Puspawati. Dari ruang tahanan yang mengekang gerakannya, ia kembali ke ruang publik dengan segurat senyum lega. Status hukumnya dipulihkan, rekam jejaknya dibersihkan, dan pintu kebebasan dibuka lebar. Selain Ira-- yang sebelumnya divonis 4,5 tahun bui serta denda Rp 500 juta-- ada dua pihak lagi yang mendapat rehabilitasi. Mereka adalah Direktur Komersial dan Pelayanan periode 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan periode 2020-2024 Harry Muhammad Adhi Caksono. Keduanya divonis masing-masing penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta. Dengan rehabilitasi tersebut, ketiganya tidak perlu menjalani pidana dan seluruh hak sipilnya dipulihkan. Jabatan mereka sebagai direksi non-aktif pun otomatis kembali aktif. Ini kali ketiga Prabowo menggunakan hak prerogatifnya. Sebelumnya, presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, yang memungkinkan keduanya bebas dari penjara. Namun di sisi lain, langkah Prabowo bisa menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebab sebelumnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikukuh ada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara Rp 1,25 triliun, meskipun tak ada uang mengalir ke kantong pribadi Ira Cs.

Pendidikan

- S1 Peternakan, Universitas Brawijaya
- S2 Manajemen Pembangunan, Asian Institute of Management (AIM)
- S3, Universitas Indonesia

Karier

- 17 tahun di GAP Inc. (AS)
- Direktur Global Initiative Regional Asia
- CEO PT Sarinah (2014-2016)
- Petinggi PT Pos Indonesia (2016-2017)
- Dirut ASDP (2017-2024), melalui SK-290/MBU/12/2017
- Masa jabatan: 6 tahun 9 bulan

Kasus

- Terkait kerja sama & akuisisi PT Jembatan Nusantara
- Dituding menimbulkan kerugian negara bersama dua pejabat lain.
- Putusan tidak bulat; dua hakim menyatakan tidak ada unsur korupsi.
- Mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo

TENTANG

IRA PUSPADEWI

BACA HAL 11...



PURBAYA TEMUI BAHILIL, KUOTA TAMBAHAN LPG 3 KG DISEPAKATI

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pertemuan terkait anggaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (elpiji/LPG). Disepakati, ada penambahan, over 0,37 juta ton atau sekitar 370.000-an metrik ton. Tapi juga dipastikan, agaran subsidi tidak akan membengkak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Keduanya belakangan diketahui membahas soal prognosa kebutuhan LPG 3 kilogram (Kg) sampai akhir tahun. Adapun, rapat itu memutuskan untuk menambah pasokan tabung gas melon sekitar 370.000 ton.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menerangkan kebutuhan LPG 3 Kg diproyeksikan bakal melebar ke level 8,5 juta ton, terpaut dari kuota yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar 8,17 juta ton.

“Prognosa sampai 2025 itu ada kebutuhan 8,5 juta metrik ton. Ada penambahan, over 0,37 juta ton atau sekitar 370.000-an metrik ton,” kata Anggia kepada awak media, Selasa (25/11/2025).

Kendati demikian, Anggia memastikan, penambahan kuota LPG 3 Kg itu tidak bakal menambah beban subsidi APBN 2025. Dia beralasan harga LPG 3 Kg belakangan berada di bawah asumsi yang ditetapkan pemerintah.

“Yang pasti ini mungkin tidak akan ada penambahan subsidi. Karena kan harganya di bawah indikator APBN,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan hasil rapat tersebut akan dilaporkan kembali ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

“Penambahan kuota tapi tidak ada penambahan subsidi,” tegas dia.

Di sisi lain, Anggia mengklaim rapat itu tidak membahas rencana pengetatan subsidi LPG 3 Kg melalui program LPG satu harga dan skema lainnya.

Untuk diketahui, alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memprediksi realisasi penyaluran tabung gas melon bakal melebar dari alokasi awal yang ditetapkan pemerintah. Saat itu, konsumsi LPG 3 Kg diperkirakan bakal menyentuh 8,36 juta ton.

Sementara itu, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, akumulasi subsidi energi tahun depan



ditetapkan sebesar Rp210,06 triliun.

Besaran tersebut terdiri atas subsidi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Rp25,10 triliun, LPG 3 Kg Rp80,3 triliun, serta listrik Rp104,64 triliun.

Dalam RAPBN 2026, menurut buku

nota tersebut, masih akan dialokasikan belanja subsidi LPG 3 Kg dan subsidi listrik rumah tangga berbasis komoditas seperti tahun-tahun sebelumnya.

Rencana kebijakan transformasi

Ekonom Ingatkan Pembenahan Data Penerima Subsidi



EKONOM Senior CORE Muhammad Ishak mengatakan, dari perspektif ekonomi makro, subsidi energi masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, yang diperkirakan masih akan lemah pada tahun mendatang. Ekonom Senior CORE Muhammad Ishak mengatakan, dari perspektif ekonomi makro, subsidi energi masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, yang diperkirakan masih akan lemah pada tahun mendatang.

Apalagi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 hanya sebesar 4,8%. “Dan kunci keberhasilan pengaturan subsidi adalah tersedianya data penerima subsidi yang akurat,” kata Ishak.

Dia melihat saat ini pemerintah memang telah menyusun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, banyak daerah yang tidak memperbarui data secara memadai karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan keterbatasan anggaran untuk memperbarui data yang bersifat dinamis.

Tanpa data yang akurat, Ishak menilai penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan sulit tercapai. Hal ini pun dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat bawah. “Oleh karena itu, skema baru penyaluran subsidi BBM sebaiknya dimulai dengan uji coba [pilot project] di wilayah terbatas. Dari uji coba

subsidi energi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi hingga Oktober 2025 mencapai Rp315 triliun atau 66,3 persen dari outlook APBN. Angka ini lebih rendah 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.(tin,voi,ist/dya)

REALISASI SUBSIDI LPG 3 KG PER TAHUN

2025 (sementara)

Rp 21,3 triliun*

2024

(realisasi semester I)

Rp 80,2 triliun

2023

Rp 95,6 triliun

2022

Rp 100,4 triliun

2021

Rp 83,8 triliun

2020

Rp 32,8 triliun

2019

Rp 44 triliun

2018

Rp 58,14 triliun

2017

Rp 47,0 triliun

tersebut, kendala-kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki,” tuturnya.

Hal ini juga sekaligus menanggapi rencana pemerintah yang tengah menggodok skema atau mekanisme baru penyaluran subsidi energi, khususnya untuk BBM dan LPG 3 kg.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, alokasi subsidi energi pada tahun depan diperkirakan akan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut, menurut dia, sejalan dengan proyeksi meningkatnya konsumsi energi di masyarakat.

“Angkanya naik sedikit ya. Subsidi sekarang kemana-mana angka persisnya agak susah. Tapi harusnya naik sedikit sesuai dengan ekspektasi meningkatnya konsumsi harusnya naik,” kata Purbaya saat melakukan kunjungan ke Kudus, Jawa Tengah, ditulis Minggu (5/10/2025).

Meski demikian, ia menegaskan, kebijakan subsidi tidak bisa

DPR RI USUL GIBRAN PINDAH KE IKN 2026

DPR RI menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka harus pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memperkuat kepercayaan publik. Komisi II juga mendorong agar para wakil menteri turut mendampingi Gibran saat mulai berkantor pada 2026 nanti.

Usul itu disampaikan anggota DPR RI Ujang Bey dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (25/11/2025).

Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar memindahkan orang, tetapi juga harus diikuti dengan pemindahan fungsi pemerintahan.

Ia menyebut telah mendengar rencana Wapres Gibran yang ingin berkantor di IKN pada 2026, sehingga menurutnya wajar jika para wakil menteri ikut pindah.

Menurut Rifqi, pemerintahan di IKN hanya bisa berjalan efektif apabila seluruh struktur ikut bekerja secara utuh, bukan hanya sebagian. Ia memberi perumpamaan dari teori yang disebutnya sebagai teori "ustaz Bey", yakni bahwa lebah hanya akan mengikuti apabila pemimpinnya terlebih dahulu pindah; jadi hanya memindahkan para pekerja tidak akan membuat proses berjalan optimal.

Dalam rapat, Rifqi juga melempar candaan kepada anggota Komisi II lain, bahwa dirinya diminta pindah terlebih dahulu ke IKN agar rekan-rekannya mau mengikuti. Ia bahkan bergurau bahwa sebelum pindah, para anggota Komisi II sebaiknya meminta fraksi masing-masing mengganti penugasan komisi mereka.

Masih dengan nada bercanda, Rifqi meminta anggota Komisi II Fraksi Gerindra, Azis Subekti, untuk terus mengingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya segera menetapkan kebijakan pemindahan ASN. Rifqi menekankan bahwa yang harus dipindah bukan hanya orang, tetapi juga wewenang dan fungsi pemerintahan.

Pada bagian akhir, terdapat komentar publik bahwa teori lebah yang disampaikan Rifqi dianggap tidak cocok, karena menurut mereka seharusnya "bos lebah" adalah presiden. Jika mengacu perumpamaan itu, maka presidenlah yang semestinya berkantor di IKN, sementara wakil presiden tetap dapat bekerja dari Jakarta.

Boyang 4.100 ASN Akhir Tahun

Sementara itu pemerintah akan memindahkan 4.100 aparatur sipil negara (ASN) di akhir tahun 2025 itu. Hal itu dipastikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki menegaskan, pembangunan ibu kota baru telah



Wapres Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan gedung Istana Wakil Presiden di IKN (28/5/2025).(dok)

memasuki fase kedua, didukung penuh oleh Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum dan politik.

Dengan target menjadi ibu kota politik pada 2028, IKN kini bergerak dalam kecepatan tinggi, tak hanya pada infrastruktur fisik tetapi juga regulasi dan ekosistem sosial. Kata Basuki, ada tiga hal dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Sementara itu, progres pembangunan IKN, terutama kawasan Istana Wapres, menjadi perhatian utama menjelang 2026. Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan fisik Istana dan kantor Wapres sudah mencapai 76 persen per Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Ia menyebutkan bahwa Istana dan kantor Wapres direncanakan sudah siap pada Desember sehingga Wapres bisa mulai

berkantor di IKN pada 2026.

Pihak Otorita IKN juga memastikan bahwa Staf Khusus Wapres akan meninjau langsung progres pembangunan dalam waktu dekat, sebagai bentuk komitmen memastikan pusat kerja Wapres dapat berfungsi tepat waktu sesuai visi pembangunan IKN.(kum,ist,gus/dya)

PEMBANGUNAN TAHAP II IKN

○ ALOKASI ANGGARAN (DATA OIKN, 16 APRIL 2025)

Total anggaran dialokasikan dari dua sumber utama:

- APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): **Rp48,8 triliun**
- KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha): **Rp60,93 triliun**

○ FOKUS PEMBANGUNAN TAHAP II

A. Fokus Pembangunan APBN

- Membangun gedung lembaga legislatif dan yudikatif.
- Membuka akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2.
- Memelihara dan mengelola prasarana sarana yang sudah selesai.

B. Fokus Pembangunan KPBU

- Membangun 97 tower apartemen dan 29 rumah.
- Membangun jalan dan multi utility tunnel (MUT) 138,6 km di KIPP.
- Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

○ PETA JALAN PEMBANGUNAN IKN

Tahap I (2020-2024)

Fokus Utama: Pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Tahap II (2025-2029)

Fokus Utama: Penyambungan infrastruktur utama ke kawasan baru yang dikembangkan setelah tahap I.

Tahap III (2030-2034)

Fokus Utama: Pengembangan infrastruktur kawasan, seperti sistem angkutan umum, pengolahan limbah-sampah, dan lain-lain.

Tahap IV (2035-2039)

Fokus Utama: Perluasan kawasan perkotaan hingga ke IKN bagian utara.

Tahap V (2040-2045)

Fokus Utama: Pengembangan industri berkelanjutan.

Pasca-2045

Fokus Utama: Pembangunan terus dilanjutkan dengan inovasi dan teknologi.



siklus. Dalam pemberian satu siklus HGU diberikan paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.(ist,rls/dya)

Masa HGU Dipangkas: Otorita Sebut Tak Ada Investor Komplain

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan tak ada komplain dari investor di IKN usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemangkas masa berlaku hak guna usaha (HGU). Basuki mengatakan putusan MK tak mencabut hak atas tanah. Dia mengatakan saat ini belum terdapat komplain apa pun dari investor.

"Insyaallah dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor pada kami," ujar Basuki dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KemenPAN-RB, Otorita IKN, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dia menegaskan putusan MK tak mencabut hak atas tanah. Namun, putusan itu hanya merevisi mekanisme pemberian HGU.

"Jadi, sedangkan untuk putusan MK tadi, itu bukan mencabut hak atas tanahnya, tapi merevisi mekanismenya," ujarnya.

Menurutnya, saat ini investor

hanya menunggu kepastian keberlanjutan IKN. Dia menilai semua ketentuan telah jelas diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

"Jadi seperti halnya dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, itu yang ditunggu investor. Kalau sebelum ada ini, saya kayak sendiri menjelaskan ke kiri kanan, tapi sekarang ada Perpres Bapak Presiden, sekarang sudah di depan. Saya di belakangnya. Misi saya melaksanakan visi Presiden. Nggak ada lain, begitu kan," tuturnya.

Sebagai informasi, MK telah memutuskan pembatalan pada ketentuan pemberian hak atas tanah (HAT) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN).

Dalam beleid tersebut, awalnya ditetapkan para investasi mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dan diberikan melalui dua

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan bahwa proses pengadaan BBM untuk Shell saat ini sudah hampir final. Dia menyebut, Shell telah mengajukan permintaan pasokan kargo untuk memenuhi kebutuhan BBM di SPBU mereka.

"Masih dalam proses, tapi masih dalam proses. Yang penting memang sudah pengajuan untuk 1 kargo Shell, dalam waktu dekat akan selesai eksekusi negosiasi. 100 ribu kalau nggak salah permintaannya," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa SPBU swasta lain seperti BP dan Vivo sudah lebih dulu atau sedikit lebih cepat dalam mengamankan kargo BBM. BP tercatat sudah memproses pengadaan kargo lanjutan, sementara Vivo juga telah mengamankan kargo pertamanya.

"Sementara BP sudah kargo kedua dan proses kargo ketiga. Vivo kargo pertama, Shell dalam tahap negosiasi akhir," jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa skema pemenuhan pasokan BBM SPBU swasta merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi kosongnya pasokan BBM. Mekanisme impor BBM untuk swasta tersebut akan kembali ke skema awal melalui pengajuan kuota impor resmi di Direktorat Migas, bukan lagi melalui skema Business to Business (B to B).

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan bahwa jadwal penyerahan pasokan sudah ditentukan. Kelak, BBM murni yang dipesan oleh Shell diproyeksikan tiba di lokasi penyerahan pada akhir bulan November 2025 sesuai dengan

SPBU SWASTA MULAI TERISI AKHIRNYA VIVO DAN SHELL BELI BBM PERTAMINA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan perkembangan terbaru terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP, dan Vivo. Khusus Shell, saat ini tengah memasuki tahap akhir negosiasi dengan PT Pertamina Patra Niaga. BP tercatat sudah memproses pengadaan kargo lanjutan, sementara Vivo juga telah mengamankan kargo pertamanya.



Suasana SPBU BP-AKR usai kelangkaan BBM Jakarta, Kamis (20/11/2025). (ANTARA)

perjanjian yang telah dibuat oleh kedua perusahaan.

"Untuk Shell, ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Ini direncanakan jadi tanggal 24 atau 25 (November) ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell," kata Yuliot, ditemui usai acara Grand Launching Indonesia's Oil and Gas Exploration 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga terus berupaya memenuhi

pasokan BBM bagi Badan Usaha Swasta (BU Swasta). Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, pada tahap kedua ini, PT Vivo Energi Indonesia telah sepakat untuk melakukan proses Business to Business dengan Pertamina Patra Niaga terkait pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.

"Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100 ribu barel (MB) yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR (BP-AKR) sebanyak 100 MB", jelas Roberth dalam siaran persnya, Senin (24/11/2025). (tin,ist,rls/dya)

SWASTA BELI BBM DARI PERTAMINA

1. SPBU Swasta yang Sudah Beli BBM Pertamina

- Vivo Energi Indonesia
- BP-AKR (Aneka Petroindo Raya)

2. Pasokan untuk Vivo

- Pertamina Patra Niaga memasok 100 ribu barel BBM murni.
- Stok sudah memenuhi seluruh persyaratan teknis Vivo.
- Harga Revvo 92 diturunkan: Dari Rp 12.890 → Rp 12.680 per liter.

3. Mekanisme Negosiasi & Penyaluran

- Berdasarkan volume permintaan.
- Tender supplier dengan prinsip GCG.
- Konfirmasi berulang antara perusahaan.
- Join Surveyor untuk memastikan spesifikasi.
- Open book untuk negosiasi aspek komersial.
- Proses bongkar selesai dan diterima Vivo.

4. Pasokan untuk BP-AKR

- Membeli 100 ribu barel BBM murni dari Pertamina.
- Distribusi pasokan:
 - a. Jabodetabek
 - b. Jawa Barat
 - c. Bertahap ke Jawa Timur
- Base fuel RON 92 untuk BP-AKR merupakan impor lewat mekanisme B2B dengan Pertamina.

5. Update Shell

- Negosiasi pembelian BBM murni (base fuel) antara Shell dan Pertamina Patra Niaga disepakati 100 ribu barel BBM murni dari Pertamina.
- Pengiriman kargo 100 ribu barel dijadwalkan tiba di titik serah yang disepakati Shell dan Pertamina pada 24-25 November 2025.

ESDM - DPR Setuju TNI dan Intelijen Jaga Kilang Minyak

WAKIL Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Akbarshah Fikarno buka suara mengenai keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk menjaga kilang dan terminal PT Pertamina (Persero). Menurut dia, keterlibatan di kilang dan terminal Pertamina sudah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi TNI untuk menjaga kedaulatan negara.

Namun, dia memastikan bahwa TNI tidak akan terlibat dalam aspek lain yang tak berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Terlebih, upaya penegakan hukum menjadi kewenangan dari polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

"Kalau kita bicara soal penegakan hukum itu semua adalah ranahnya polisi dan para aparat penegak hukum. Jadi fungsinya ini lebih kepada pengamanan akan objek vital

nasional," ujar Dave kepada awak media, Selasa (25/11/2025).

Senada, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai rencana penugasan prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pertamina merupakan langkah yang wajar. Ia mengatakan kilang minyak termasuk obyek vital nasional sehingga harus mendapatkan pengamanan maksimal dari semua aparat pertahanan dan keamanan negara.

"Untuk penugasan TNI ini kan karena obyek vital nasional. Jadi objek vital nasional itu harus diamankan, termasuk oleh TNI dan kepolisian," kata Yuliot kepada wartawan di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Wacana penugasan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) mulanya

disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengatakan prajurit TNI Angkatan Darat dengan didampingi oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) akan ditugaskan untuk menjaga kilang dan terminal Pertamina mulai Desember 2025.

Prajurit TNI Angkatan Darat dan BAIS akan dikerahkan untuk mengetahui potensi ancaman yang mungkin muncul dan mengancam kedaulatan energi. Sehingga, TNI bisa melakukan antisipasi dan pengamanan secara fisik.

Dia mengklaim, penugasan prajurit tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sekadar catatan, salah satu operasi militer selain perang dalam beleid tersebut adalah mengamankan objek vital nasional

yang bersifat strategis.

Pada 2025, Sjafrie melaporkan Indonesia sudah memiliki 150 batalion TNI. Batalion itu bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah, pengamanan, dan menjaga industri strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara. (tmo,ist/dya)

PELUANG PERIKSA SRI MULYANI DI KORUPSI PAJAK

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini menyiapkan aturan baru. Salah satunya mewajibkan pelanggan seluler melakukan registrasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition). Tindakan ini diklaim untuk mencegah kejahatan seperti penyebaran hoaks, judi online, SMS spam, dan penipuan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan jaksa sementara ini belum memeriksa Sri Mulyani meski waktu menjabatnya beririsan dengan tempus perkara yang tengah diusut. Hal ini terjadi karena perkara ini tak berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Sementara tidak ada. Ini kan tidak terkait dengan kebijakan tax amnesty, tidak ada. Ini di luar itu konteks ya," ujar Anang kepada awak media, Selasa (25/11/2025).

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung mengatakan sudah memeriksa sekitar 40 saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020 oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Supriatna mengatakan saksi tersebut terdiri dari berbagai unsur, mulai dari birokrasi hingga swasta. Namun, Anang tidak menjelaskan identitas lengkap pihak yang sudah diperiksa.

Hal yang terang, Kejaksaan telah memeriksa orang-orang yang sudah dicegah ke luar negeri. Sekadar catatan, lima orang yang dicegah ke luar negeri adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2016-2017 Ken Dwijugiastead; Direktur Utama Djarum Foundation Victor Rachmat Hartono; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang Bernadette Ning Diah Prananingrum; pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman; dan konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.

"Yang dicekal sudah diperiksa, saya tidak bilang lima atau berapa ya. Cuma yang dicekal itu sudah ada diperiksa. Sampai saat ini kooperatif," ujar dia.

Belakangan, Kejaksaan memang membantah bahwa perkara yang diusut sejak Oktober 2025 itu berkaitan dengan tax amnesty. Anang mengatakan bentuk dugaan tindak pidana korupsi adalah berupa



Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Supriatna. (Istimewa). Ist

pengurangan kewajiban pembayaran pajak. Namun, dia belum menjelaskan lebih lengkap mengenai konstruksi perkara, termasuk apakah ada sejumlah imbalan yang diberikan

kepada oknum pegawai pajak.

Pernyataan Anang sekaligus membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kasus yang ditangani

Kejagung: Beberapa Perusahaan Terlibat

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan rasuah, berupa pengurangan nilai pembayaran pajak perusahaan dan perorangan. Korps Adhyaksa menegaskan pihak terlibat lebih dari satu.

"Beberapa perusahaan sih, yang jelas lebih dari satu ya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Anang enggan memerinci nama-nama perusahaan yang terlibat dalam kasus pajak. Penyidik Kejagung dipastikan masih mengumpulkan data.

"Mengumpulkan data-data yang lebih valid lagi dalam rangka nantinya pembuktiannya untuk ditingkatkan, ini kan sifatnya masih dik (penyidikan) umum," ujar Anang.

Kejagung tengah mengusut kasus baru. Dugaan korupsi terjadi di sektor perpajakan.

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan

atau wajib pajak," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Supriatna melalui keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).

Anang mengatakan ada sejumlah pihak yang dengan sengaja tidak mencatatkan kewajiban pembayaran pajak perusahaan atau individu. Negara merugi karena tidak mendapatkan nominal yang sesuai.

Kasus ini terjadi pada 2016 sampai 2020. Menurut Anang, ada keterlibatan pejabat pajak yang diusut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sekitar 40 saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Supriatna mengatakan puluhan saksi itu berasal dari pihak birokrasi dan swasta.

"Udah 40-an. 40 [orang] lebih mungkin, hampir 40-an [saksi]," kata Anang, di Kejagung, Selasa (25/11/2025). Namun, Anang tidak mengungkap secara detail terkait

Kejagung berkaitan dengan proses tax amnesty masa lalu.

"[Tidak ada permintaan data dari Kejagung ke saya] tapi yang jelas ya beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan," ujar Purbaya.

Kejaksaan Agung juga mengakui telah melakukan pengeledahan pada delapan lokasi pada Minggu lalu (23/11/2025). Pengeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020 oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Supriatna mengatakan pengeledahan dilakukan pada sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. Namun, dia enggan mengelaborasi lokasi pasti pengeledahan tersebut. (gus,ist,kum/dya)

5 ORANG YANG DICEKAL KEJAKSAAN AGUNG TERKAIT DUGAAN KORUPSI PAJAK

-  **Victor Rachmat Hartono**
Direktur Utama PT Djarum
-  **Ken Dwijugiastead**
Mantan Direktur Jenderal Pajak
-  **Karl Layman**
Pemeriksa Pajak Muda DJP Jakarta Selatan I
-  **Heru Budijanto Prabowo**
Konsultan pajak
-  **Bernadette Ning Diah Prananingrum**
Kepala KPP Madya Semarang

KASUS PAJAK PALING FENOMENAL DI INDONESIA

-  **Gayus Tambunan**
(2009-2010)
 - Pegawai DJP, manipulasi pajak dan rekening gendut.
 - Kerugian negara: Rp 570,95 juta (salah satu kasus).
 - Hukuman: 7-10 tahun penjara + denda Rp 300-550 juta.

-  **Denok Taviperiana & Totok Hendriyatno** (2010-2013)
 - Mantan pegawai pajak & komisaris swasta, suap pengurusan restitusi pajak.
 - Kerugian negara: Rp 21 miliar.

dengan sosok yang telah diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung di perkara pajak ini. (ist,bis,ant/dya)

Masa Tinggal Wisman di Kota Malang Kurang Lama

Ilustrasi: Wisatawan mancanegara di Kampung Warna-warni Jodipan, Kota Malang. (Santi/Lentera)



MALANG - Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Kota Malang tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Sayangnya masa tinggal para turis ini masih tergolong rendah.

Pemerintah Kota (Pemkot) tengah berupaya meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan, yang saat ini hanya 1-2 hari. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, mengatakan langkah ini dilakukan

menyusul tren meningkatnya kunjungan wisatawan asing di sejumlah titik Kota Malang sejak pertengahan tahun 2025 ini.

"Memang ada kecenderungan meningkat wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Kota Malang. Alhamdulillah Kota Malang semakin banyak dikenal oleh wisman dengan kemannyanya, kenyamanannya, udaranya juga enak, kulinerinya banyak," ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Meskipun tidak menyebutkan data riil, Baihaqi mengatakan dominasi wisatawan asal Eropa masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Kota Malang.

Namun, tantangan utama yang kini dihadapi adalah pendeknya durasi tinggal wisatawan asing di Kota Malang. Baihaqi menyebut, rata-rata wisman masih menghabiskan waktu 1-2 hari di Kota Malang, sehingga

strategi khusus perlu dipersiapkan untuk memperpanjang lama tinggal tersebut.

"Memang mereka akan lebih lama stay di Bali, tetapi paling tidak Malang ini sudah menjadi bagian dari paket wisata mereka. Nah itu yang nanti akan kami tarik, supaya lebih banyak lagi yang lama stay-nya di sini," katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang turut mengonfirmasi kondisi serupa. Berdasarkan Perkembangan Pariwisata September 2025 dalam berita resmi statistik yang dirilis 3 November 2025, Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) di Kota Malang mencapai 1,44 hari.

Angka tersebut naik tipis 0,03 hari dibandingkan bulan Agustus 2025 yang berada di angka 1,41 hari. Secara regional, RLMT Kota Malang pada periode yang sama tercatat 0,17 poin lebih tinggi dibandingkan RLMT Jawa Timur yang berada di angka 1,27 hari. Namun, angka itu masih 0,08 poin lebih rendah dari RLMT nasional yang mencapai 1,52 hari.

Lebih lanjut, sejumlah upaya disiapkan Disporapar Kota Malang untuk mendorong wisatawan agar tinggal lebih lama di kota ini. Baihaqi menegaskan, kolaborasi menjadi kunci. Mengingat sektor pariwisata tidak hanya dipengaruhi kondisi internal kota,

tetapi juga wilayah sekitar.

"Karena berbicara wisata ini tidak ada batas administratif wilayah. Kota Malang kondusif, tetapi di luar Kota Malang kurang kondusif, itu juga berpengaruh. Maka sinergi Malang Raya itu sangat penting sekali," jelasnya.

Ia menekankan, ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur, kenyamanan, serta keamanan harus dijaga secara menyeluruh, termasuk dukungan dari wilayah Jawa Timur lainnya.

Tak hanya itu, Baihaqi menyebut program 1.000 event yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, juga menjadi langkah strategis dalam mendongkrak minat wisatawan. Ia menilai, berbagai event yang digelar menjadi daya tarik tambahan yang efektif menarik wisatawan sekaligus memperpanjang durasi tinggal mereka.

"Kami sedang menginventarisasi, melakukan kurasi event yang benar-benar sesuai standar, yang bisa kami jual. Artinya nilainya nanti kami tetapkan menjadi event tetap di Kota Malang," terangnya.

Di sisi lain, Baihaqi menyampaikan, saat ini capaian kunjungan wisatawan terus dipantainya. Disebutkannya, hingga Oktober 2025, realisasi kunjungan wisata Kota Malang telah mencapai 77 persen dari target tahunan 3,3 juta kunjungan. (Santi/Dya)

Profiling ASN Petakan Potensi dan Karir 641 Pejabat hingga Fungsional di Kabupaten Malang

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai memetakan potensi dan pola karier 641 pejabatnya. Pejabat dari eselon II hingga jabatan fungsional mengikuti rangkaian penilaian yang digelar melalui kegiatan Profiling ASN (ProASN) pada 24-27 November 2025.

"Para peserta terdiri dari pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), pejabat administrator, pengawas, serta pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdanyah, dikonfirmasi Selasa (25/11/2025).

Nurman menjelaskan, penilaian kompetensi ini dilaksanakan di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM bekerja sama dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dimana seluruh penilaian dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

(SIASN) milik BKN.

"Pemetaan ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penerapan manajemen talenta ASN di daerah, sesuai amanat nasional tentang sistem merit. Jadi pengelolaan ASN yang menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Bukan karena kedekatan pribadi, senioritas, atau faktor nonprofesional lainnya," katanya.

Menurut Nurman, kegiatan ini juga merupakan program prioritas BKN yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN). Tujuannya untuk menyediakan data potensi pegawai secara lengkap dan digital sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan karier.

Disebutkannya, dalam proses penilaian tahun ini, peserta menjalani serangkaian tes menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT). Penilaian tersebut meliputi Tes Potensi Psikologis, Tes Manajerial dan Sosial Kultural, Tes Literasi Digital, serta Preferensi Karier.

Nurman menyampaikan, seluruh instrumen penilaian telah distandardisasi sesuai regulasi BKN dan Kementerian PAN-RB. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penempatan jabatan, penyusunan pola karier, dan pembentukan talent pool ASN Pemkab Malang.

Total sebanyak 773 soal disiapkan untuk peserta. Nurman merinci, Tes Potensi Psikologi terdiri atas lima subtes dengan 525 soal. Tes Manajerial dan Sosial Kultural memiliki dua subtes dengan 45 soal, Tes Literasi Digital empat subtes dengan 35 soal, dan Preferensi Karier empat subtes berisi 168 soal.

"Melalui penilaian ini akan tersedia data potensi dan kompetensi ASN baik dari sisi manajerial, sosial kultural, literasi digital, maupun preferensi karier," jelasnya.

Pemkab Malang menargetkan

Pejabat Eselon II hingga fungsional di lingkup Pemkab Malang mengikuti Profiling ASN (ProASN) 2025, 24-27 November 2025. (dok. bkpsdm_kabmalang)



tersedianya data kompetensi ASN yang lengkap, akurat, dan terintegrasi. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengisian jabatan, perencanaan pengembangan kompetensi, penyusunan talent pool daerah, hingga penguatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). (Santi/Dya)

JEPANG PASANG RUDAL DEKAT TAIWAN, CHINA MURKA

Pemerintah China murka mengetahui rencana Jepang yang tetap melanjutkan pemasangan sistem rudal di Pulau Yonaguni, salah satu wilayah Jepang yang berada paling dekat dengan Taiwan. Beijing menilai langkah tersebut sebagai tindakan provokatif yang bisa meningkatkan ketegangan militer di kawasan.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri China menuduh Tokyo sengaja memperkeruh situasi dan memicu konfrontasi. Juru bicara Mao Ning menyebut kebijakan itu berbahaya, terlebih setelah pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menyinggung kemungkinan Jepang melakukan intervensi jika Taiwan diserang China.

Meskipun mendapat protes keras dari Beijing, Jepang tetap melanjutkan pembangunan fasilitas rudal tersebut. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menegaskan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat pertahanan nasional, bukan untuk menyerang. Menurutnya, penempatan rudal di Yonaguni, berjarak hanya sekitar 110 km dari Taiwan, dapat menjadi penghalang jika terjadi ancaman bersenjata.

Pulau Yonaguni sendiri telah menjadi pangkalan Pasukan Bela Diri Jepang sejak 2016. Hubungan Jepang-China belakangan memburuk setelah pernyataan PM Takaichi mengenai Taiwan, yang dianggap Beijing melewati batas.

China terus menegaskan klaimnya atas Taiwan dan tidak menutup opsi penggunaan kekuatan jika diperlukan.

Di sisi lain, Taiwan justru memberikan dukungan pada langkah Jepang. Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan, Wu Chih-chung, menyatakan Jepang berhak menjaga keamanan wilayahnya, selama tindakan tersebut tidak mengancam negara lain. Ia menilai penempatan rudal Jepang selaras dengan kepentingan Taiwan yang selama ini tidak memiliki permasalahan teritorial dengan Tokyo.

Takaichi Layangkan Surat ke PBB

Jepang mengkritik surat China yang dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tokyo menilai Beijing menyalahartikan pernyataan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengenai Taiwan, mengatakan surat tersebut "tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar."

"Pernyataan China bahwa Jepang akan menggunakan hak pertahanan diri, bahkan tanpa ada serangan bersenjata itu keliru," tulis Duta Besar Jepang untuk PBB Kazuyuki Yamazaki dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tertanggal 24 November.



Juru bicara pemerintah menyuarakan pandangan yang sama pada Selasa (25/11/2025) pagi. "Klaim yang tidak sesuai dengan fakta

dari pihak China tidak dapat diterima, dan saya yakin pemerintah Jepang perlu dengan tegas membantah dan menyampaikan hal

ini," kata juru bicara pemerintah Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers.

Surat China kepada PBB merupakan bagian dari respons diplomatik lebih lanjut setelah pada 7 November Takaichi mengemukakan potensi teoretis bahwa Jepang bisa mengerahkan militernya bersama negara lain jika China menyerang Taiwan.

Ringkasan surat tersebut menyebut Duta Besar China untuk PBB Fu Cong menyatakan bahwa pernyataan Takaichi merupakan "kali pertama Jepang mengeluarkan ancaman penggunaan kekuatan terhadap China."

Dalam tanggapannya, Yamazaki menulis: "Kebijakan pertahanan fundamental Jepang adalah strategi pertahanan pasif, yang sepenuhnya berorientasi pada pertahanan, bertentangan dengan klaim pihak

Perbandingan Kekuatan Militer China vs Jepang

1. INDEKS & POSISI MILITER

- China : memiliki Power Index 0,0788 dan berada di peringkat 3 dunia menurut Global Fire Power.
- Jepang : memiliki Power Index sekitar 0,1839 dan menduduki peringkat 8 dunia.

2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN MOBILISASI POPULASI:

- China : 1,41 miliar jiwa;
- Jepang : 123 juta jiwa.

Personel Aktif:

- China : 2,5 juta
- Jepang : 261 ribu.

Cadangan:

- China ~510 ribu;
- Jepang ~56 ribu.

3. KEKUATAN UDARA

Jumlah pesawat militer total:

- China : 3.309 unit,
- Jepang : 1.443 unit.

Pesawat tempur:

- China : 1.212 unit;
- Jepang : 217 unit.

4. KEKUATAN DARAT

Tank utama:

- China : sekitar 6.800 unit,
- Jepang : hanya 521. (FAJAR)

5. KEKUATAN LAUT

Total kapal militer:

China memiliki jumlah armada sangat besar, jauh melebihi Jepang.



Xi Jinping Bicara dengan Trump

PRESIDEN China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump berbicara melalui sambungan telepon. Dalam momen itu, Xi kembali menegaskan sikap negaranya terhadap Taiwan.

Kantor berita Xinhua melaporkan, Xi memberi tahu Trump bahwa kembalinya Taiwan ke pemerintahan China merupakan bagian penting dalam tatanan internasional pasca perang.

"China dan AS sekali lagi berdiri bersama melawan fasisme dan militerisme, dan mengingat apa yang sedang terjadi, lebih penting bagi mereka (Taiwan) untuk bersama-sama menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II," kata Xi dalam perbincangannya dengan Trump, Selasa (25/11/2025).

Pernyataan Xi itu menuai penolakan keras dari Taiwan. Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan kembalinya pulau itu ke China bukanlah pilihan.

"Kami harus sekali lagi menegaskan bahwa Republik China (Taiwan), adalah negara yang sepenuhnya berdaulat dan independen," kata Cho di luar gedung parlemen, dikutip dari Reuters.

"Bagi 23 juta penduduk negara kami, 'kembali' (ke China) bukanlah

pilihan -- ini sangat jelas," katanya lagi.

China menawarkan model "satu negara, dua sistem" yang selalu ditolak oleh Taiwan. Bagi China, Taiwan merupakan isu diplomatik yang paling penting dan sensitif.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Hsiao Kuang-wei mengatakan bahwa China memutarbalikkan fakta seputar Perang Dunia II. Hsiao kemudian merujuk pada pernyataan AS pada September lalu tentang bagaimana China mencoba menggunakan dokumen dari era itu untuk menekan dan mengisolasi Taiwan.

"China telah berulang kali mencoba mengintimidasi dan menekan negara-negara tetangga seperti Taiwan dan Jepang di kawasan dengan sifat ekspansionisnya yang otoriter," kata Hsiao.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Republik Rakyat China mengambil alih pemerintahan penerus Republik China pada 1949.

"Kedaulatan dan integritas teritorial China tidak akan berubah," kata Mao. (ana,ist/dya)

5 Kesalahan Minum Teh Ini Diam-diam Rusak Kesehatan, Catat!

Menikmati teh ternyata bukan sekadar menuangkan air panas ke dalam daun atau kantong teh, lalu menyeruputnya begitu saja. Ada aturan tersendiri agar manfaat teh bisa dirasakan secara maksimal, sekaligus menghindari potensi efek negatif bagi kesehatan. Dari waktu terbaik untuk menyeduh, suhu air yang ideal, hingga pemilihan bahan tambahan seperti gula, madu, atau susu, setiap langkah dapat memengaruhi kandungan antioksidan, katekin, dan polifenol yang terkandung dalam teh. Kesalahan kecil, misalnya menambahkan gula berlebihan atau menyeduh terlalu lama, tidak hanya mengurangi cita rasa, tetapi juga bisa menurunkan khasiat teh bagi tubuh.

Ibu tersebut menyebut alasannya Selain kopi, banyak orang minum teh untuk mengawali hari. Minum teh pada pagi hari dapat memberikan energi tanpa membuat gelisah. Teh juga mengandung L-theanine, asam amino yang bantu meningkatkan fokus.

Namun, minum teh ada aturannya agar kamu bisa mendapatkan asupan nutrisi dan manfaat sehatnya dengan maksimal. Jika salah, bukan tidak mungkin konsumsi teh justru dapat membuat perut tidak nyaman dan menambah beban kerja liver. Bahkan, beberapa jenis teh memiliki sensitivitas tertentu terhadap makanan atau minuman lain yang dikonsumsi bersamaan, sehingga pemahaman tentang cara menyeduh yang tepat menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara optimal.

Dengan memahami aturan dasar menikmati teh, pengalaman meminum

minuman klasik ini tak hanya memuaskan indera, tetapi juga menyehatkan tubuh secara menyeluruh. Dikutip dari Times of India berikut 5 kesalahan meracik teh yang diam-diam dapat merusak kesehatan:

Menyeduh teh terlalu lama

Hindari menyeduh daun teh atau teh celup terlalu lama karena membuat level kafein dan tannin meningkat. Asupan tannin berlebih dapat mengiritasi lapisan lambung, memicu keasaman, dan menyebabkan sembelit. Teh yang terlalu kuat rasanya juga bisa membuat beban kerja liver meningkat. Sebab liver perlu memproses kafein terkonsentrasi dengan kecepatan yang lebih tinggi.

Untuk waktu ideal menyeduh teh, berbeda tergantung jenisnya. Pada teh hijau sekitar 1-3 menit menggunakan suhu air 70-80 C. Sementara pada teh hitam waktu seduhnya 3-5 menit dengan suhu air 90-100 C. Lalu untuk teh celup umumnya butuh waktu 2-3 menit saja.

Minum teh saat perut kosong

Kesalahan mengonsumsi teh juga termasuk meminumnya pagi hari dalam kondisi perut kosong. Dalam kondisi itu, perut sebenarnya bersifat sangat asam. Ketika terpapar kafein dan tannin, maka dapat memicu mual, perut bergas, dan keasaman parah. Solusinya,

minum teh setelah kamu mengonsumsi makanan ringan. Minum pelan-pelan agar tidak mengiritasi lapisan lambung dan tidak mengganggu sistem pencernaan.

Pakai terlalu banyak gula

Banyak orang suka minum teh manis, tapi perhatikan porsi gula dan pemanis yang dipakai. Jangan berlebihan karena bisa memengaruhi kesehatan usus dan liver. Gula 'memberi makan' bakteri jahat di usus, memperlambat pencernaan, dan menyebabkan perut kembung. Sementara itu, efek konsumsi gula berlebihan pada

liver adalah gula akan diubah menjadi lemak. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit hati berlemak seiring waktu.

Kebanyakan minum teh

Hindari terlalu banyak minum teh setiap hari. Lebih dari 3 atau 4 cangkir teh sudah tergolong berlebihan. Asupan kafein yang berlebih dari teh dapat mengiritasi lambung, memicu asam lambung, menyebabkan dehidrasi, dan meningkatkan ketergantungan pada stimulan. Jika terlalu banyak minum teh, kerja liver juga akan semakin berat. (tim,ist/dya)

Kelompok Orang yang Disarankan Hindari Teh Hijau

Teh hijau juga perlu diwaspadai. Minuman ini tak cocok untuk semua kelompok karena efek samping yang mungkin ditimbulkan dari senyawa kafein, tannin, dan katekin di dalamnya. Berikut 5 kelompok orang yang disarankan tidak minum teh hijau. Terlebih jika kondisi perut kosong:

Ibu Hamil dan Menyusui

Saat hamil dan menyusui, tidak disarankan konsumsi banyak teh hijau. Sebab asupan kafein berlebih meningkatkan risiko keguguran hingga gangguan perkembangan bayi.

Kemudian, kafein bisa 'mengalir' ke air susu ibu (ASI) hingga membuat anak mengalami stimulasi berlebih. Pakar menyarankan konsumsi teh hijau tidak lebih dari 2 cangkir per hari untuk para wanita yang sedang melalui fase ini.

Orang Punya Asam Lambung

Waspadai konsumsi teh hijau jika kamu punya perut sensitif atau asam lambung. Minum jenis teh ini bisa meningkatkan produksi asam lambung karena kandungan tanninnya. Efek sampingnya yaitu perut kembung, sembelit, hingga gejala asam lambung yang parah. Terlebih

jika teh hijau dikonsumsi saat perut kosong.

Anak-anak

Teh hijau tidak cocok dikonsumsi anak-anak. Kafein pada teh hijau dapat memicu stimulasi berlebih pada sistem saraf anak-anak. Lalu tannin pada teh hijau dapat menghalangi penyerapan nutrisi penting, seperti protein dan lemak, yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak.

Penderita Anemia

The hijau bisa menghambat kemampuan tubuh menyerap zat besi nonheme yang kerap ditemukan pada makanan nabati, telur, dan olahan susu.

Bagi mereka yang anemia atau sudah kekurangan zat besi, maka efeknya bakal lebih buruk. Untuk menghindari hal ini, sangat disarankan minum teh hijau di antara waktu makan. Jangan menjadikannya minuman pendamping saat makan. Jangan lupa tambahkan sumber vitamin C pada makanan untuk bantu penyerapan zat besi.

Orang yang Sensitif Kafein

Beberapa orang mengalami kondisi sensitif akan kafein. Bahkan asupan kafein sedikit saja bisa memicu gejala seperti jantung berdegar kencang, gelisah, hingga bergetar. Kelompok orang ini disarankan tidak minum kebanyakan teh hijau. Satu cangkir saja cukup atau beralih ke minuman tanpa kafein atau minuman herbal. Sebagai informasi, satu cangkir teh hijau bisa mengandung 20-45 mg kafein. (*)



UBUR-UBUR 'SAMURAI', SPESIES BARU LEPAS PANTAI JEPANG

Dalam studi yang dipublikasikan di *Frontiers in Marine Science*, mahasiswa Universitas Tohoku memaparkan spesies baru *Physalia mikazuki*. Diambil dari nama Date Masamune, seorang samurai lokal. Ini adalah spesies *Physalia* pertama yang dideskripsikan secara resmi di Jepang.



Ubur-ubur perang Portugis (Portuguese man o' war), atau *Physalia*, adalah makhluk seperti jeli yang menggunakan balon berisi gas khusus untuk mengapung di permukaan laut. *Physalia* menghuni area pertemuan laut dan atmosfer, berbeda dengan kebanyakan ubur-ubur yang melayang lebih dalam.

Bagian tubuhnya yang serupa balon berfungsi sebagai layar, yang memungkinkannya meluncur mengikuti angin dan arus. Kelompok besar terkadang terbawa ke garis pantai, tempat mereka jarang terlihat karena perubahan angin dan suhu laut.

Dalam studi yang dipublikasikan di *Frontiers in Marine Science*, mahasiswa Universitas Tohoku memaparkan spesies baru spesies ini yang berbisa. Nama *Physalia mikazuki* diambil dari nama Date Masamune, seorang samurai lokal yang terkenal karena mengenakan bulan sabit di helmnya. Ini adalah spesies *Physalia* pertama yang dideskripsikan secara resmi di Jepang, dan penampakan

pertama di wilayah Tohoku yang dingin, hampir 2.000 km di utara habitat aslinya di sekitar Okinawa.

Studi baru ini juga mengisyaratkan hal yang lebih besar. Bagaimana pemanasan laut dan perubahan arus laut mungkin mengarahkan kehidupan laut tropis ke perairan utara yang tak terduga.

"Prosesnya sangat rumit, merekam semua struktur tubuh unik yang membedakannya dari empat spesies *Physalia* lainnya. Saya mengamati setiap bagian, membandingkan penampilannya dengan buku-buku kuno tempat para ilmuwan menggambar anatomi ubur-ubur dengan tangan. Tantangan yang nyata ketika Anda melihat betapa banyak bagian yang rumit," kata Chanikarn Yongstar, penulis pertama studi ini, dikutip dari *New Atlas*.

Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira *Physalia utriculus* adalah satu-satunya ubur-ubur Portugis yang hanyut dari Okinawa ke Teluk Sagami. Namun, sebuah studi

mendalam baru-baru ini, yang memadukan anatomi ubur-ubur, DNA, dan pemodelan laut, mengungkapkan sebuah kejutan: *Physalia mikazuki* telah ada di sana sejak lama.

Penemuan ini dipicu oleh penampakan di ujung utara, di Pantai Gamo, Tohoku. Ternyata, kedua spesies itu berenang bersama, tersembunyi di tempat yang mudah terlihat, hingga salah satu dari mereka hanyut cukup jauh hingga mengundang tanda tanya.

"Analisis morfologi dan DNA kami mengonfirmasi bahwa spesimen ini merupakan spesies baru, berbeda dari kerabat tropisnya. Temuan ini sendiri sangat menarik, tetapi kami masih memiliki pertanyaan tentang bagaimana spesies ini bisa ada di sini," kata Kei Chloe Tan, yang melakukan analisis DNA.

Para peneliti mempelajari suhu dan arus laut dari waktu ke waktu untuk memahami pergeseran di laut utara lepas pantai Jepang. Dengan menggabungkan data satelit dan simulasi, mereka mengungkap tren yang mencolok. Arus Kuroshio bergerak ke utara, dan perairan pesisir menghangat 2 hingga 4°C.

Perubahan ini memungkinkan *Physalia mikazuki*, yang umumnya dianggap sebagai ubur-ubur tropis, untuk pindah ke habitat utara yang lebih dingin. Ini merupakan tanda yang jelas bahwa pergeseran laut akibat iklim sedang membentuk kembali rute migrasi laut dan menulis ulang peta keanekaragaman hayati.

Menggunakan simulasi partikel, para ilmuwan menemukan bahwa *Physalia mikazuki* kemungkinan

besar hanyut ke utara mengikuti Arus Kuroshio, menyatu dengan sepupunya, *P. utriculus*, di sepanjang perjalanan. Hanya butuh 30 hari untuk mencapai Teluk Sendai, dan 45 hari untuk berlayar hingga Aomori.

Perjalanan tersembunyi ini menunjukkan bagaimana perubahan arus dan pemanasan laut dapat secara diam-diam membentuk kembali peta kehidupan laut.

"Saya menjalankan simulasi partikel, seperti menjatuhkan bola pantai merah terang ke dalam air, lalu membuat estimasi berbasis data untuk melacak di mana bola-bola itu akan berakhir beberapa hari atau bulan kemudian," jelas rekan penulis studi Muhammad Izzat Nugraha.

"Kami sangat senang menemukan bahwa dalam simulasi kami, semua bola pantai pada dasarnya membentuk jejak dari Teluk Sagami hingga tepat di tempat kami menemukan 'man-o-war helm bulan sabit' di wilayah Tohoku," jelasnya.

Penemuan *Physalia mikazuki* merupakan peringatan sekaligus tonggak sejarah ilmiah. Ubur-ubur ini perlu diawasi ketat di sepanjang pantai untuk memastikan keselamatan pengunjung pantai karena sengatannya yang menyakitkan dan tentakelnya yang dapat tumbuh hingga beberapa meter panjangnya.

Namun, ini juga mengingatkan kita betapa banyak yang masih harus kita pelajari. Dengan memadukan taksonomi, analisis DNA, dan pemodelan laut, para peneliti mengungkap spesies tersembunyi dan melacak bagaimana perubahan iklim mengubah batas-batas kehidupan laut. Di tengah lautan yang terus berubah, mengamati pantai juga bisa berarti melihat sekilas masa depan. (ist,new/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Daster A-Line Kekinian, Nyaman dan Tetap Elegan di Rumah

Daster A-line menjadi sahabat setia para wanita yang mendamba kenyamanan tanpa meninggalkan sentuhan gaya. Bentuknya yang melebar lembut di bagian bawah memberi ruang gerak yang lapang sekaligus menciptakan siluet yang manis, anggun, dan proporsional. Baik dipakai untuk bersantai, bekerja dari rumah, maupun menyambut tamu dengan rasa percaya diri, daster A-line menghadirkan harmoni antara fungsi dan estetika dalam sekali sentuhan.

Ragam desain modern dengan warna dan motif yang semakin variatif. Berikut tujuh model daster A-line kekinian yang bisa menjadi inspirasi untuk penampilan elegan di rumah.

Daster A-Line Tanpa Lengan

Daster tanpa lengan memberikan kesan sederhana namun tetap modis untuk aktivitas sehari-hari. Potongan A-line yang longgar memberikan ruang gerak maksimal, sekaligus menciptakan tampilan yang mengalir dan nyaman dipakai seharian.

Selain terasa segar di tubuh, model ini mudah dipadukan dengan inner tipis atau cardigan untuk tampilan

yang lebih rapi ketika menerima tamu. Desainnya yang minimalis memberi kesan effortless, cocok untuk Anda yang ingin tampil stylish tanpa repot.

Daster A-Line Lengan Panjang dengan Ruffle

Model ini menghadirkan kesan feminin melalui aksesoris ruffle pada bagian lengan atau bawah daster. Detail tersebut menambah dimensi visual, membuat tampilan lebih anggun dan modern. Potongannya tetap longgar sehingga nyaman digunakan untuk beraktivitas di rumah maupun menghadiri acara keluarga kecil. Bahan yang lembut dan flowy menjadikan daster ini ideal untuk pemakaian sepanjang hari.

Daster A-Line Layered / Bertingkat

Daster bertingkat menawarkan tampilan *ceria* dan kontemporer melalui layering di bagian bawah. Lapisan tersebut menciptakan efek mengalir yang

dinamis namun tetap ringan dipakai.

Model ini bisa dipadukan dengan aksesoris sederhana untuk tampilan elegan saat di rumah. Cocok untuk wanita yang ingin tampil *standout* tanpa meninggalkan unsur kenyamanan.

Daster A-Line dengan Detail Kancing Depan

Kancing depan memberi sentuhan klasik sekaligus memudahkan pemakaian. Tak hanya fungsional, detail ini juga mempercantik tampilan dan mampu memberikan kesan modern serta rapi.

Daster ini fleksibel dipadukan dengan kaos atau inner, bahkan cardigan untuk nuansa lebih formal. Pilihan tepat bagi yang ingin praktis namun tetap elegan.

Daster A-Line Belted / Ikat Pinggang

Model ini menonjolkan siluet tubuh melalui belt atau tali pinggang yang dapat disesuaikan. Meski bagian bawahnya tetap longgar, aksesoris belt membuat penampilan lebih terstruktur dan stylish.

Cocok digunakan untuk aktivitas harian, menerima tamu, hingga acara

keluarga kecil. Model ini memberikan keseimbangan sempurna antara estetika dan kenyamanan.

Daster A-Line Panjang Maxi

Daster panjang hingga mata kaki memberikan kesan anggun tanpa meninggalkan kenyamanan khas potongan A-line. Siluetnya memanjangkan tampilan tubuh dan terlihat mewah meski dipakai di rumah. Bisa dipadukan dengan sandal simpel dan aksesoris minimalis untuk menampilkan gaya elegan dalam berbagai kesempatan bersama keluarga.

Daster A-Line dengan Aksesoris Renda dan Tali Serut Pinggang

Model ini tampil cantik dengan motif floral bergaya batik atau shibori yang dikombinasikan dengan renda putih di bagian kerah V-neck. Tali serut di pinggang memungkinkan pemakainya menyesuaikan bentuk agar terlihat lebih ramping dan berstruktur. Perpaduan kenyamanan dan detail feminin membuat daster ini cocok sebagai *home dress* yang elegan dan modern. Mana pilihan gayamu di rumah? (ist, gus/dya)



Jurus Sakti Rehabilitasi ...dari hal 1

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry dilakukan sesuai aturan karena perkara mereka telah berkekuatan hukum tetap.

Yusril menjelaskan, sebelum Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) rehabilitasi, Kepala Negara telah meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

"Sebelum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) rehabilitasi kepada tiga mantan Direksi PT ASDP tersebut, Presiden sudah meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA)," kata Yusril di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Tiga pihak yang menerima rehabilitasi tersebut adalah Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 Ira Puspawati, Direktur Komersial dan Pelayanan periode 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan periode 2020-2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.

Menurut Yusril, MA telah memberikan pertimbangan tertulis yang kemudian dicantumkan dalam konsiderans Keppres. Ia menegaskan bahwa dasar hukum pemberian rehabilitasi muncul karena putusan Pengadilan Tipikor terhadap ketiganya telah inkrah, sebab baik para terdakwa maupun jaksa KPK tidak mengajukan banding.

"Karena telah berkekuatan hukum tetap, maka Presiden berwenang untuk memberikan rehabilitasi kepada mereka," ucap Yusril.

Dengan rehabilitasi tersebut, ketiganya tidak perlu menjalani pidana dan seluruh hak sipilnya dipulihkan. Jabatan mereka sebagai direksi non-aktif pun otomatis kembali aktif.

Yusril menyebut rehabilitasi bukan kebijakan baru. Ia mengingatkan bahwa Presiden ke-3 RI B.J. Habibie pernah memberikan rehabilitasi kepada Heru Rekso Dharsono pada 1998. Presiden Prabowo pun, kata dia, belum lama ini memberikan rehabilitasi kepada dua guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang telah kembali aktif mengajar usai menjalani putusan MA.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjamin mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati bisa langsung bebas

setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kira-kira begitulah," kata Prasetyo, saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Terkait pertimbangan kenapa Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspawati, Prasetyo tidak menjawab secara jelas. "Banyak kan tadi," kata Prasetyo, sambil melambatkan tangan.

Rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspawati.

"Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," imbuh dia.

Usai rehabilitasi itu, penasihat hukum Ira dkk, Soesilo Aribowo, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/11). Dalam pantauan di lokasi, Soesilo tiba sekitar pukul 19.39 WIB.

Soesilo menjelaskan, tujuan kedatangannya ke KPK untuk memastikan surat keputusan pemberian rehabilitasi tersebut telah

diterima lembaga antirasuah.

"[Tujuan kedatangan] akan mengecek apakah surat itu sudah sampai apa belum. Kalau sudah sampai tentu kita akan mengajukan pembebasan terhadap Ibu Ira," ujar Soesilo kepada wartawan di lokasi.

"Saya belum tahu apakah KPK sudah menerima suratnya atau belum, tentu kalau sudah menerima surat saya akan menanyakan apakah bisa dilakukan pembebasan malam ini," imbuhnya.

Ia berharap, surat keputusan rehabilitasi itu telah diterima KPK malam ini. Sehingga, kliennya pun bisa segera menghirup udara bebas.

KPK Tegaskan Sesuai Prosedur

KPK mengungkapkan proses penanganan kasus korupsi di ASDP yang menjerat Ira Puspawati selaku mantan Dirut tidak melanggar hukum. KPK mengatakan penanganan kasus tersebut sudah sesuai prosedur.

"Kami dari penyidik, penyidik maupun penuntut umum yang menangani perkara ini, secara formil pekerjaan kami itu sudah diuji dengan adanya pengajuan pra-peradilan. Dan kami juga sudah melewati itu," ungkap Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

"Artinya, secara formil apa yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik itu tidak melanggar hukum. Artinya sesuai dengan prosedur yang ada," lanjutnya. Selain itu, Asep menyebut, secara materil, penanganan kasus ini

juga sudah dipertanggungjawabkan di persidangan. Pemenuhan unsur-unsur pasal sudah diuji di persidangan dan sudah diputuskan.

"Rekan-rekan juga tentunya mengikuti, pada tanggal 20 November yang lalu, sudah divonis atau dijatuhkan vonis kepada para terdakwa. Jadi artinya ini juga menjawab. Jadi secara formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai," jelas Asep.

"Artinya selesai itu pekerjaan kami sudah lulus dari uji material, uji formil dengan memenangkan praperadilan dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis Majelis Hakim pada tanggal 20 November," imbuh dia.

Kemudian Asep juga menilai, pemberian rehabilitasi terhadap Ira dkk merupakan hak istimewa yang dimiliki Presiden. Dia pun memastikan, KPK tidak memandang pemberian rehabilitasi ini sebagai preseden buruk bagi penanganan korupsi di Indonesia.

"Bagi kami, itu bukan merupakan preseden buruk. Karena ini berbeda. Tadi kami bisa sampaikan, bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai baik secara formil, pembuktian secara formil, maupun secara material. Dan perlu dibedakan terhadap hasil yang terhadap putusan itu, kemudian saat ini diberikan rehabilitasi, itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut," pungkasnya. (tin,ist,kum,dtc/dy)

Pengamat: Kebiasaan Baru, Bisa Jadi Alat Politik

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi ASDP.

Herdiansyah menilai langkah tersebut semakin menguatkan kekhawatirannya mengenai penggunaan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti, abolisi, hingga rehabilitasi.

"Ini yang saya khawatirkan sejak awal ketika presiden memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Kemudian minggu lalu memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru di Palopo, Sulawesi Selatan. Saya melihat amnesti dan abolisi ini bisa menjadi kebiasaan baru presiden," ujar Herdiansyah.

Jika praktik itu terus dinormalisasi, Ia menilai

penggunaan kewenangan tersebut dapat berkembang menjadi alat politik untuk melindungi orang-orang dekat presiden dalam kasus tertentu di masa depan.

"Kekhawatirannya adalah jika ini menjadi kebiasaan, presiden dapat menggunakan kewenangan itu untuk membentengi orang-orang di lingkarannya. Dari Hasto, Tom Lembong, lalu tiga orang dalam kasus ASDP. Besok-besok presiden bisa dengan mudah memberikan amnesti, abolisi, atau rehabilitasi," tegasnya.

Herdiansyah menilai pemberian rehabilitasi dalam perkara korupsi ASDP justru kontraproduktif dengan sistem peradilan. Pasalnya, perkara tersebut belum selesai dan masih memiliki jalur hukum lanjutan.

"Ini merusak skema penyelesaian hukum. Perkara ASDP ini baru diputus di tingkat Tipikor.

Masih ada banding, masih ada kasasi. Kalau dianggap salah, koreksinya ada di pengadilan, bukan pada presiden," ujarnya.

Menurutnya, rehabilitasi sebagai bentuk pengampunan presiden seharusnya diberikan ketika terdapat kesalahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan. Namun mekanisme koreksi terhadap kesalahan itu berada di tangan lembaga peradilan, bukan eksekutif.

"Jika vonis 4,5 tahun itu dianggap keliru, maka koreksi dilakukan di pengadilan tinggi atau kasasi. Bukan melalui hak subjektif presiden yang justru mengabaikan proses peradilan," jelasnya.

Herdiansyah juga mengingatkan bahwa kewenangan presiden dalam memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi seharusnya tidak diterapkan pada kasus-kasus korupsi. (ist,med/dya)

TENGGAT VISA HAJI 8 FEBRUARI 2026, JANGAN TERLEWAT!

Pemerintah Arab Saudi menetapkan batas akhir penginputan data jamaah calon penerima visa haji pada 8 Februari 2026. Artinya, seluruh proses pelunasan, verifikasi, hingga finalisasi data harus berjalan tepat waktu dan tidak bisa melewati batas waktu yang ditentukan. Kendala dokumen perjalanan sering ditemukan pada paspor. Mulai masa berlaku yang tidak memenuhi syarat, ketidaksesuaian identitas, hingga keterlambatan penerbitan.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mohammad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

"Dengan adanya tenggat tersebut seluruh proses pelunasan, verifikasi, hingga finalisasi data harus berjalan tepat waktu dan tidak bisa melewati batas waktu yang ditentukan," ujar Irfan.

Irfan menjelaskan bahwa penerbitan visa bagi jamaah haji reguler akan berlangsung dalam rentang 8 Februari hingga 20 Maret 2026. Menurutnya, periode tersebut menjadi masa krusial bagi Indonesia untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

"Rentang waktu ini menjadi fase kritis bagi Indonesia untuk memastikan seluruh data dan dokumen jamaah telah lengkap, serta tervalidasi sehingga pengajuan visa dapat diproses tanpa hambatan dan seluruh kuota keberangkatan dapat terakomodasi tepat waktu," tuturnya.

Selain proses visa, Irfan juga memaparkan mekanisme pembagian kartu Nusuk kepada jamaah. Kartu itu akan didistribusikan di masing-masing embarkasi oleh petugas syariah yang datang ke Indonesia sekitar satu minggu sebelum keberangkatan.

"Kartu Nusuk dibagikan dalam keadaan belum aktif, dan kemudian diaktivasi pada H-1 sebelum jamaah terbang ke Arab Saudi. Aktivasi terpusat ini memastikan seluruh data jamaah tersinkronisasi dengan sistem Saudi, serta menjamin fungsi kartu Nusuk berjalan optimal saat tiba di Tanah Suci," ungkapnya.

Terkait dokumen perjalanan, Irfan menyoroti sejumlah kendala paspor yang sering muncul, seperti masa berlaku yang tidak memenuhi syarat, ketidaksesuaian identitas, hingga keterlambatan penerbitan. Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan berlapis agar tidak mengganggu proses pemvisaan.

"Pemeriksaan dan verifikasi paspor secara berjenjang di tingkat kabupaten, provinsi, serta embarkasi menjadi kunci agar tidak ada jamaah



yang tertunda keberangkatannya akibat permasalahan dokumen pada fase pemvisaan," pungkasnya.

Kuota Resmi 203.320 Jamaah

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan kuota haji reguler Indonesia ditetapkan sebesar 203.320 jamaah. Gus Irfan mengatakan kuota haji reguler itu terbagi dalam beberapa rincian.

Gus Irfan mengatakan penetapan kuota reguler itu telah dituangkan dalam keputusan Menteri Haji dan Umroh.

"Penetapan kuota telah dituangkan secara resmi dalam keputusan Kementerian Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 tentang kuota haji reguler yang ditetapkan 1 Oktober 2025," kata Gus Irfan.

Dalam keputusan itu, ditetapkan

203.320 orang. Terdiri dari kuota jamaah haji reguler, kuota prioritas lanjut usia, kuota pembimbing ibadah haji, hingga kuota petugas haji.

"Indonesia memperoleh kuota jamaah haji reguler 203.320 orang, yang terdiri atas kuota jamaah haji reguler 191.419 orang, kuota prioritas lanjut usia 10.166 orang, kuota pembimbing ibadah haji (ketua kloter dan pembimbing ibadah) 685 orang, dan petugas haji daerah 1.050 orang," tuturnya.

Diketahui, total kuota haji RI 2026 sebanyak 221 ribu. Rincian penerapannya digunakan untuk kuota haji reguler sebesar 203.320 jamaah (92 persen) dan kuota haji khusus 17.680 jamaah (8 persen).

Rencananya, kloter pertama akan memasuki asrama haji pada 21 April. Kemudian, pemberangkatan kloter pertama direncanakan pada 22 April 2026.(wid,kum,ist/dya)

JUMLAH KASUS BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG DILAPORKAN

Jawa Timur

42.409

Jawa Tengah

34.122

Jawa Barat

29.643

Sulawesi Selatan

9.670

Banten

9.124

Hotel Jamaah RI Terjauh 4,5 Km dari Masjidil Haram

KEMENTERIAN Haji dan Umrah menetapkan batas jarak hotel ke Masjidil Haram di Makkah untuk jamaah haji 2026. Kemenhaj mengungkap batas jarak terjauh hotel jamaah dari Masjidil Haram sekitar 4.500 meter..

Hal itu diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Gus Irfan mengatakan akomodasi di Makkah akan ditetapkan setelah seluruh proses penyediaan dan kontrak layanan selesai.

"Adapun gambaran awal menunjukkan bahwa jarak terjauh akomodasi dari Masjidil Haram berada sekitar 4.500 meter dengan kebijakan check-out mengikuti jadwal pergerakan kloter menuju

Madinah atau Bandara Jeddah," kata Gus Irfan.

Dia menjelaskan, secara umum, penempatan jamaah dalam Kota Makkah terbagi menjadi empat kawasan utama, yakni Jarwal, Miswalah, Syisyah, dan Raudhah. Dia mengatakan hal itu akan difinalisasi dan dipetakan secara lengkap setelah penyediaan selesai dengan estimasi publikasi pada Februari 2026.

Sementara itu, Kemenhaj menetapkan batas jarak hotel jamaah di Madinah. Dia mengatakan jarak terjauh hotel jamaah selama berada di Madinah tak boleh melebihi 1.000 meter dari Masjid Nabawi.

"Akomodasi jamaah di Madinah akan ditetapkan setelah proses penyediaan meliputi jumlah hotel, kamar, dan kapasitas per kamar dengan ketentuan bahwa jarak terjauh hotel ke Masjid Nabawi tidak

melebihi 1.000 meter," ujar Irfan.

Gus Irfan mengatakan jamaah akan tinggal di Madinah selama 9 hari atau 9 hari 8 malam. Dia mengatakan proses check-out disesuaikan dengan keberangkatan jadwal kloter berikutnya.

"Untuk perjalanan menuju Makkah, dipergunakan bus Naqabah berkapasitas 47 seat yang diisi maksimal 45 jamaah, dilengkapi fasilitas AC, mikrofon, dan air mineral, serta didampingi petugas ibadah dan petugas haji dalam setiap bus," ujarnya.

Dia mengatakan semua layanan haji tersebut telah mengikuti standar pemerintah Arab Saudi. Hal itu dengan tujuan memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah selama di Madinah. (ist,dtc/dya)